

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MALINAU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, maka ia mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial terjemahan dari visi, misi dan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan datang.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk dievaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah ini dalam mendorong penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang tertuang dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 disusun dengan berpedoman padasasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD;
3. Penyusunan rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Malinau;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD;

2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunanDaerah,TataCara Evaluasi RancanganPeraturanDaerah TentangRencanaPembangunanJangkaPanjang DaerahdanRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah,serta TataCara PerubahanRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,danRencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023 ini adalah tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan program dan kegiatan prioritas untuk ditetapkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 a. Pengolahan data dan informasi
b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR, dan lain-lain)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 a. Pengolahan data dan informasi

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2023 tentu membutuhkan berbagai macam data dan informasi yang baru sebagai bahan masukannya. Berkaca dari tahun yang telah dilalui yakni tahun 2021, maka bisa dilihat kondisi yang melingkupi. Pada saat itu dan hingga tahun 2022, pandemi virus COVID-19 masih merajalela dan belum berakhir. Hal ini tentu berpengaruh kepada pelayanan bagi masyarakat.

Berbagai macam program dan kegiatan yang telah tertera pada DPA Tahun Anggaran 2021 hingga paruh tahun ke dua atau memasuki semester ke II belum bisa dilaksanakan karena ada kendala teknis dan surat edaran dari Pemerintah Propinsi Kaltara tentang larangan pengadaan lelang kegiatan fisik hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan refocusing/pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat untuk penanganan Pandemi COVID-19. Dengan adanya berbagai kebijakan ini maka APBD Kab. Malinau mengalami perubahan atau penurunan yang menyebabkan perubahan pula pada setiap OPD termasuk Dinas Perindag.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan anggaran kegiatan dijadikan bahan evaluasi sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam renstra dapat direalisasikan. Secara garis besar, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2021 kurang lebih sama dengan tahun 2020 yakni fokus untuk penanganan COVID-19. Karena pada masa itu tengah maraknya Varian Delta dari Pandemi COVID-19 ini yang sangat banyak memakan korban jiwa dan biaya/ongkos perawatan untuk penanganan orang-orang yang terpapar. Namun dengan kondisi tersebut berbagai kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai/direalisasikan dengan baik.

b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

OPD Dinas Perindag telah melakukan review terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana yang tertera di dalam dokumen renja OPD sebagai bahan evaluasi terhadap realisasi/hasil atas target kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 bidang dan 1 sekretariat sesuai dengan tupoksi masing-masing sebagai pihak pelaksana atau pelaku kegiatan. Adapun bidang-bidang yang ada pada Dinas Perindag adalah :

1. Bidang Industri dan TTG
2. Bidang Perdagangan
3. Bidang Pengelolaan Pasar
4. Bidang Koperasi dan UMKM
5. Sekretariat

Adapun besaran anggaran belanja yang dikelola dan dipergunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.373.926.411,- termasuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.5.373.794.686,- .

Berdasarkan data kinerja progres kegiatan hingga akhir triwulan IV tahun anggaran 2021, anggaran yang terserap sebesar Rp. 11.497.116.463,- atau 90,58 %. Sedangkan kinerja fisik progresnya mencapai 98,28 %. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari rekapitulasi realisasi kegiatan belanja langsung OPD Dinas Perindag per 31 Desember 2021 yang dilaporkan setiap bulan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Malinau dan yang telah diinput melalui aplikasi Monev.lkpp.go.id pada kolom TEPR.

Berdasarkan hasil laporan tersebut, maka progres capaian kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perindag tahun 2021 dinilai tinggi karena mendekati target 100 % baik dari aspek penyerapan anggaran maupun aspek fisik kegiatan.

Adapun hasil evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 1 T-C.29 sebagai berikut:

TABEL 1. T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)

KABUPATEN MALINAU

OPD : DINAS PERINDAG KAB. MALINAU

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	1	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase diklat koperasi yang diadakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1	0	2.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anggota koperasi yang ikut diklat	18%		18%	18%	100%	18%	18%	100%
2	1	0	2.0	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta pelatihan (orang)	75		300	300	100%	75	75	100%

2	1 7	0 7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase cakupan Usaha Mikro yang diberdayakan	5%		5%	5%	100%	5%	5%	100%
2	1 7	0 7	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase kemampuan UKM yang diberdayakan	5%		5%	5%	100%	5%	5%	100%
2	1 7	0 7	2.0 1	0 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang diberdayakan (orang)	80		80	80	100%	80	80	100%
2	1 7	0 7	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	2		2	1	50%	2	2	100%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	3 0	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase capaian	80%		80%	32%	40%	80%	80%	100%
3	3 0	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase capaian	80%		80%	32%	40%	80%	80%	100%
3	3 0	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	7		7	5	71%	7	7	100%
3	3 0	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	7		7	5	71%	7	7	100%

					SKPD									
3	3 0	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan (orang)	38		38	38	100%	38	38	100%
3	3 0	0 1	2.0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	5	71%	5	5	100%
3	3 0	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	5	71%	5	5	100%
3	3 0	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	5	71%	5	5	100%
3	3 0	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 0	0 1	2.0 3	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	7	100%	5	5	100%
3	3 0	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.0 5	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	7	100%	5	5	100%
3	3 0	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item barang yang disediakan (unit)	8		8	8	100%	8	8	100%
3	3 0	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item barang yang disediakan (item)	20		20	20	100%	20	20	100%
3	3 0	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang yang disediakan (item)	5		8	8	100%	5	5	100%

3	3 0	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian	100%		100%	61%	61%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honor yang dipekerjakan (orang)	8		8	8	100%	8	8	100%
3	3 0	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.0 9	0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara (unit)	6		13	14	108%	6	6	100%
3	3 0	0 1	2.0 9	0 8	Pemeliharaan Aset Tidak Tetap	Jumlah aset tidak tetap yang dipelihara	1		1	0	0%	1	1	100%
3	3 0	0 1	2.1 3		Penataan Organisasi	Prosentase capaian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 1	2.1 3	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	5		7	7	100%	5	5	100%
3	3 0	0 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0%		100%	33%	33%	0%	0%	0%
3	3 0	0 3	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase capaian pembangunan dan pengelolaan	0%		100%	8%	8%	0%	0%	0%
3	3 0	0 3	2.0 1	0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun (unit)	0		2	0	0%	0	0	0%
3	3 0	0 3	2.0 2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase capaian pembinaan	100%		80%	80%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 3	2.0 2	0 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah pasar yang diberdayakan	19		10	10	100%	19	19	100%

					Perdagangan	pengelolaannya (pasar)								
3	3 0	0 4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80%		80%	80%	100%	80%	80%	100%
3	3 0	0 4	2.0 1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase capaian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 4	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	2		2	2	100%	2	2	100%
3	3 0	0 4	2.0 1	0 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah monitoring yang dilakukan (kali)	24		24	24	100%	24	24	100%
3	3 0	0 4	2.0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Malinau	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 4	2.0 2	0 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring yang dilakukan (kali)	24		24	24	100%	24	24	100%

3	3 0	0 4	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang diadakan	4		4	4	100%	4	4	100%
3	3 0	0 6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 6	2.0 1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat UTTP Yang Sesuai Standar Metrologi Legal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 0	0 6	2.0 1	0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang (alat)	300		200	200	100%	300	300	100%
3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 1	0 2	2.0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3 1	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi yang dilakukan (kali)	2		2	6	300%	2	2	100%
3	3 1	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang terdata (orang)	1500		1500	1500	100%	1500	1500	100%

3	3 1	0 2	2.0 1	0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana IKM yang tersedia (unit)	4		9	8	89%	4	4	100%
3	3 1	0 2	2.0 1	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku IKM yang diberdayakan (orang)	30		0	0	0%	30	30	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 dapat dilihat bagaimana kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perindag kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Perindag Kab. Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah kewenangan 3 Kementrian yakni: Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut hingga akhir tahun 2021 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Sektor Industri

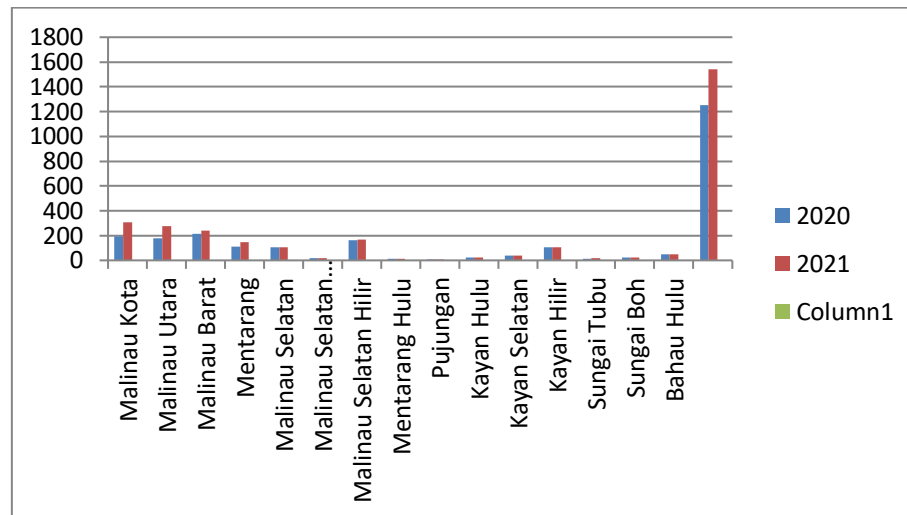
a. Perkembangan Usaha

Pertumbuhan industri di Kabupaten Malinau tahun 2021 cukup baik disaat Pandemi Covid 19 sedang melanda dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Berbagai kebijakan dan peraturan yang telah pemerintah keluarkan untuk menekan laju penularan virus Covid 19 seperti PPKM dan sebagainya memang berdampak pada pertumbuhan di sektor ekonomi. Kendatipun demikian, sektor yang menguasai hajat hidup manusia ini terbukti cukup tangguh untuk bertahan ditengah guncangan badai Pandemi Covid 19. Pertumbuhan industri di Kabupaten Malinau masih tetap berlangsung dan tumbuh sebagaimana layaknya situasi normal. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat daerah-daerah lain keadaannya cukup memprihatinkan bahkan ada yang sangat menurun. Tahun 2021 yang telah lewat merupakan tahun yang sulit bagi sebagian pengusaha khususnya pada sektor industri. Beruntung di Kabupaten Malinau masih menunjukan perkembangan yang cukup baik. Hingga saat ini sektor industri masih didominasi oleh pelaku usaha kecil. Sumber daya alam yang melimpah semestinya merupakan modal utama untuk berkembang. Namun potensi tersebut belum bisa diolah secara optimal karena rendahnya kualitas SDM pelaku usaha lokal dalam penguasaan iptek modern, manajemen usaha dan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha.

Profil Industri di Kab. Malinau bersifat padat karya dengan fasilitas peralatan sederhana dan manual sehingga kapasitas produksi masih terbatas. Namun dengan kesederhanaan tersebut jumlah usaha industri di Kabupaten

Malinau masih bias tumbuh dan berkembang. Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2
Data Perkembangan Jumlah Industri di Kabupaten Malinau 2021



Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021

Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2021

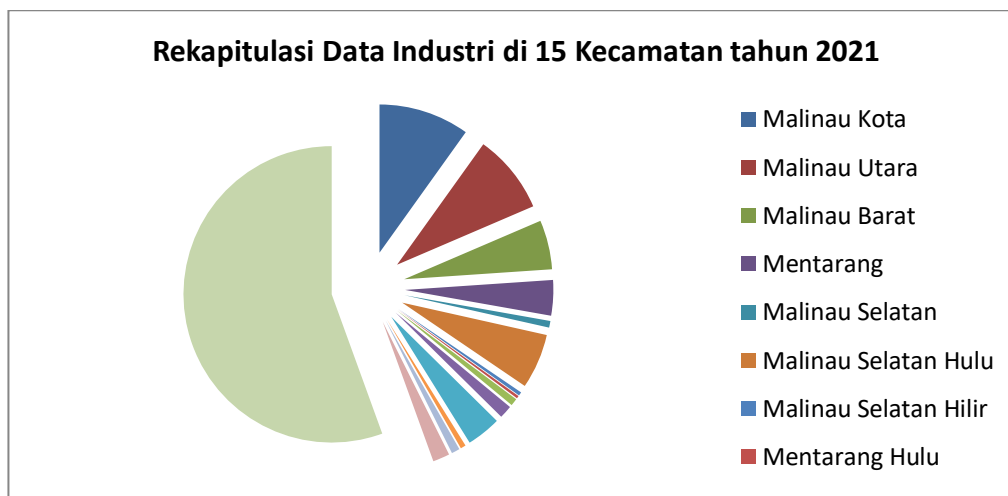
No	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal

		5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving 2. Moulding
4.	Kerajinan	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
5.	Furniture	1.Meubelair
6.	Konveksi	1.Penjahitan

Sumber : Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2021

Rekapitulasi data industri perkecamatan se-Kab. Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

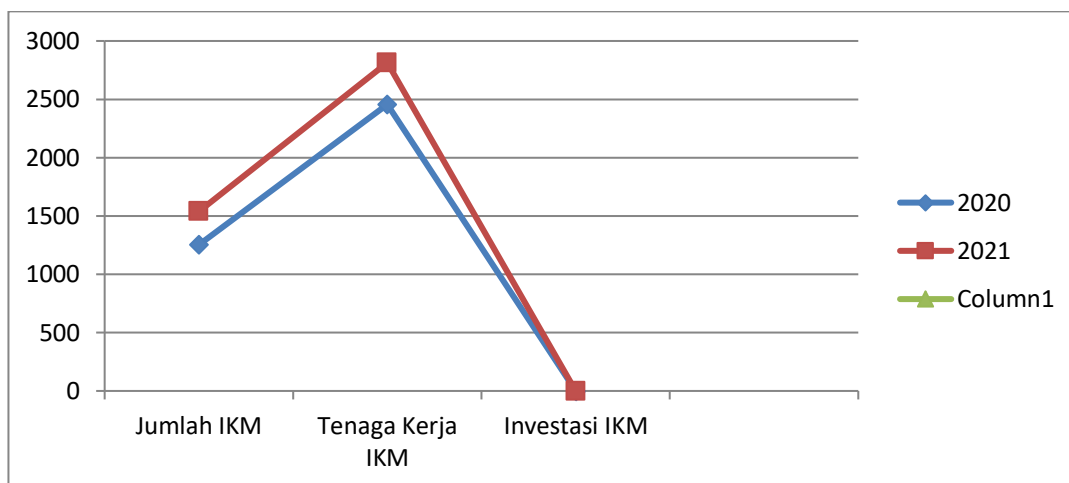
TABEL 4
Rekapitulasi Data Industri di 15 Kecamatan tahun 2021



b. Jumlah Investasi Sektor Industri

Investasi sektor industri di Kabupaten Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5
Data Investasi Sektor Industri tahun 2021



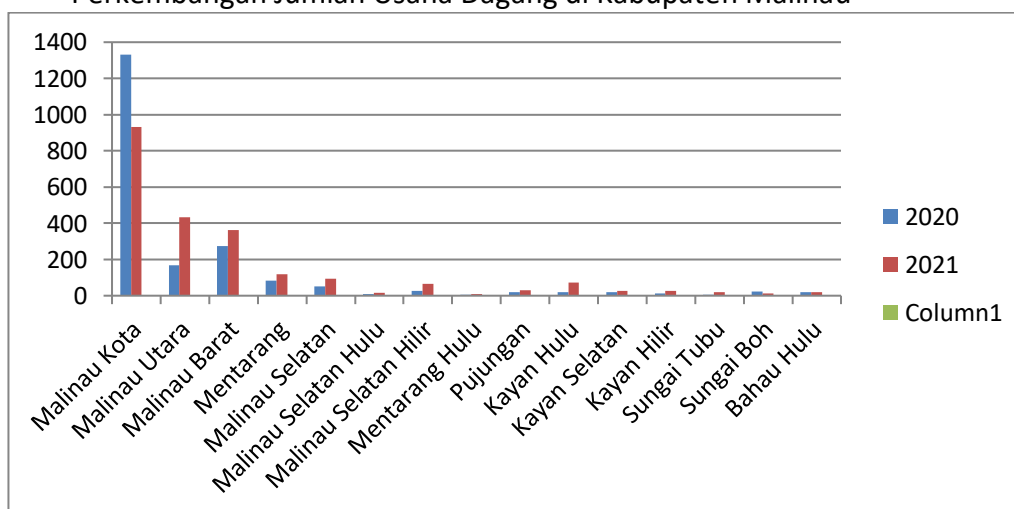
Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

2. Sektor Perdagangan

a. Perkembangan Usaha Dagang

Pertumbuhan usaha dagang di Kabupaten Malinau hingga akhir tahun 2021 cukup baik ditengah bergejolaknya wabah PANDEMI Covid 19. Peran sektor perdagangan sangat besar bagi kemajuan daerah Kabupaten Malinau karena sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Berdasarkan data tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6
Perkembangan Jumlah Usaha Dagang di Kabupaten Malinau

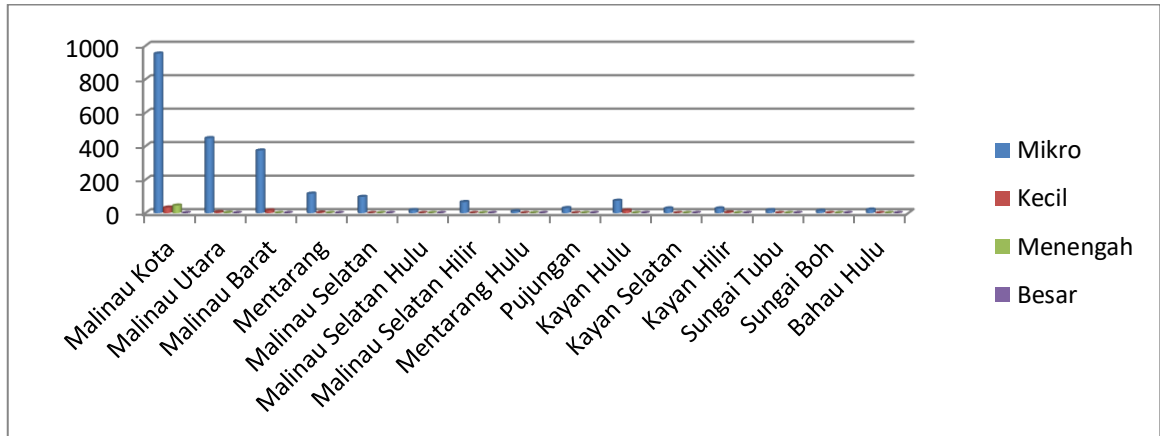


Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah pedagang di Kabupaten Malinau telah mencapai 2301 orang. Peningkatan jumlah terjadi di beberapa kecamatan terdekat dan yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Untuk melihat rincian

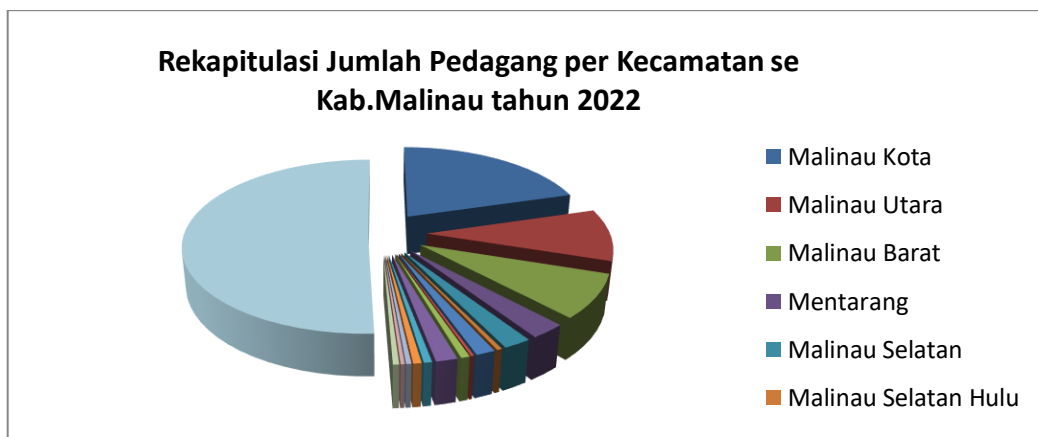
jumlah usaha dagang perkecamatan se Kab. Malinau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7
Klasifikasi Jenis Usaha Perdagangan Per Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2021



Sumber : Dinas Perindag tahun 2021

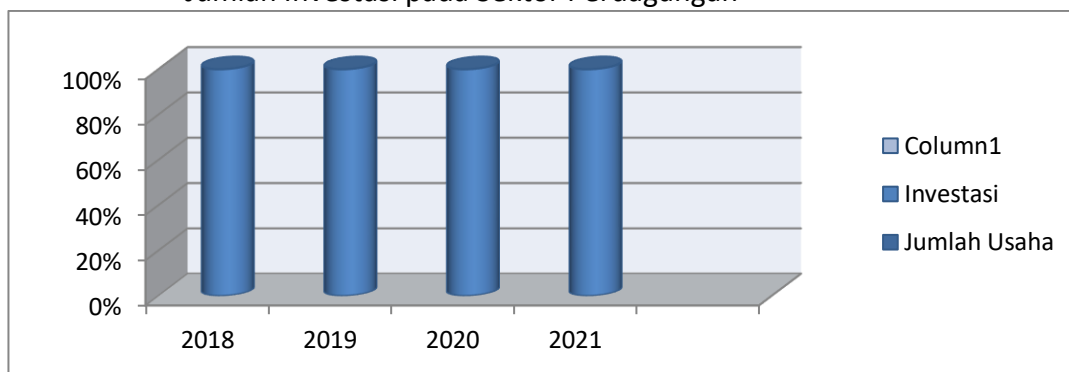
TABEL 8
Rekapitulasi data jumlah pedagang per Kecamatan se Kab. Malinau tahun 2021



b. Perkembangan Investasi sektor Perdagangan

Prediksi jumlah investasi di sektor perdagangan untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 9
Jumlah Investasi pada Sektor Perdagangan



Sumber : Dinas Perindag Kab.Malinau tahun 2021

2.Sektor Koperasi dan UMKM

a. Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 129 unit. Data tersebut masih sama dengan data tahun 2020. Belum ada penambahan jumlah koperasi baru di tahun 2021. Keragaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10
DATA NAMA KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN SE KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021

No	Nama Koperasi	Alamat		Badan Hukum		Jenis Usaha	Keterangan	
		Jalan	Kecamatan	Nomor	Tanggal		Aktif	Tdk Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEC. MALINAU KOTA								
1	KSU. Maya Taka	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	04/BH/Perindagkop/I/2002	29/01/2002	USP, BBM	Aktif	-
2	KSU. Pagun Taka	JL. Panembahan RT. III	Malinau Kota	16/BH/Perindagkop/XII/2003	16/11/2003	USP, Sarang	Aktif	-
3	KSU. Sejahtera	Batu Lidung	Malinau Kota	22/BH/Perindagkop/X/2005	24/10/2005	USP, Jasa, Sembakau	Aktif	-
4	KSU. Pakuaja	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	016/BH/Perindagkop/VI/2003	02/06/2003	USP, Kredit Tanah	Aktif	-
5	KSU. Cahaya Mulya	Jl. Duyan RT. III Desa Malkot	Malinau Kota	36/BH/Perindagkop/II/2007	07/02/2007	USP Sembakau	-	TA
6	KSU. Persekutuan Dayak	Jl. Ahmad Kosasi RT. II Malkot	Malinau Kota	38/BH/Perindagkop/VI/2007	14/06/2007	Sembakau	-	TA
7	KSU. Bayangkara	Jl. Pusat Perkantoran (Polres)	Malinau Kota	41/BH/Perindagkop/IX/2007	19/09/2007	USP, Jasa, Sembakau	Aktif	-
8	KSU. Gerakan Hati Bangsa	Desa Pelita Kanaan	Malinau Kota	068/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2011	14/09/2011	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
9	KSU. Sangkutu Bane	Jl. Swadaya Malinau Kota	Malinau Kota	34/BH/Perindagkop/IX/2006	17/09/2006	Saprodi	-	TA
10	KSU. Anak Pantai	Malinau Kota	Malinau Kota	23/BH/Perindagkop/II/2006	12/02/2006	Pengecer BBM	-	TA
11	Koptan. Intulun	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	144/BH/KDK/17.3/VIII/2000	07/08/2002	USP	-	TA
12	KPN. Wana Jaya	Jl. Pusat Pemerintahan Malinau	Malinau Kota	047/BH/Perindagkop/XI/2008	06/11/2008	USP	Aktif	-
13	Kopkut Darat. Rukun Lestari	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	051/BH/Perindagkop/VI/2003	02/03/2003	Angkutan	Aktif	-
14	Kopwan. Karya Wanita	Kantor PKK Kab. Malinau	Malinau Kota	014/BH/Perindagkop/VI/2002	11/06/2002	USP, Sembakau, RM	Aktif	-
15	Kopsek. Handayani SMPN 1	SMPS. N. 1 Malinau Kota	Malinau Kota	017/BH/Perindagkop/XI/2003	16/11/2003	ATK	Aktif	-
16	Kopdit. CU. Femung Pebaya	Jl. Pelita Kanaan	Malinau Kota	109/BH/PAD/Perindagkop&UMKM/VIII/2015	28/7/2015	USP	Aktif	-
17	KPN. Mafit Jaya	Pulau Betung Malinau Hulu	Malinau Kota	010/BH/Perindagkop/VI/2002	10/06/2002	USP, Toko	Aktif	-
18	Koperasi Simpan Pinjam TAAN TOU	Jl. Raja Pandita Malinau Hulu	Malinau Kota	39/BH/Perindagkop/VIII/2007	13/08/2007	USP	Aktif	-
19	Koperasi Malinau Sejahtera	Jl. Pusat Perkantoran (Kodim 0910)	Malinau Kota	90/BH/Perindagkop/I/2014	8/1/2014	USP, Toko	Aktif	-
20	Kop. Peternak Intimung Satria Mandiri	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	059/BH/Perindagkop/XI/2010	03/11/2010	Peternakan	-	TA
21	Koptanbun Persatuan Rakyat	Jl. Panembahan Malinau Kota	Malinau Kota	132/BH/KDK/17.3/VI/2000	10/06/2000	Kehutanan	-	TA
22	Koppas Swakarsa	JL. Panembahan RT	Malinau Kota	127/BH/KDK/17.3/V/2000	29/05/2000	USP	-	TA
23	Koptanbun. Tanah Tepun	Desa Pelita Kanaan	Malinau Kota	79/BH/KDK/17.3/VIII/1999	02/08/1999	USP, Sembko	-	TA
24	Kopontren. Amanah	Jl. Swadaya Malinau Kota	Malinau Kota	24/ BH/Perindagkop/II/2006	09/02/2006	Sembako	-	TA

25	KSU Udip Mading	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	110/BH/Perindagkop&UMKM/VIII/2015	01/07/2015	-	Aktif	-
26	KSU Tirta Intimung	Desa Malinau Kota	Malinau Kota	111/BH/Perindagkop&UMKM/XI/2015		-	Aktif	-
27	Koptan. Pandan Lestari	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	308/BH/Prindagkop & UMKM/XII/2013	17/12/2013	USP, Jasa Angkutan	Aktif	-
28	Kop. Pasar Buah GERDEMA	Malinau Kota	Malinau Kota	100/BH/Prindagkop & UMKM/I/2014	23/01/2014	Jasa, Pemasaran	Aktif	-
29	Koptan. Gotong Royong	Desa Kabiran	Malinau Kota	68/BH/KDK/17.3/VI/2000	22/06/2000	USP, Saprodi	-	TA
30	Koptan. Teguh Karya	Desa Tanjung Keranjang	Malinau Kota	144/BH/KDK/17.3/VII/2000	07/08/2000	USP, Saprodi	Aktif	-
31	Kop. Jasa SMAN 1 Malinau	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	104/BH/Perindagkop&UMKM/II/2014	20/5/2014	-	Aktif	-
32	KSU Distakot Malinau	Desa Malinau Hulu	Malinau Kota	105/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2014	16/9/2014	-	Aktif	-
33	Koperasi Seludan Jaya	Tanjung Keranjang	Malinau Kota	108/BH/XXXIV.4/III/2015	23/3/2015	-	Aktif	-
34	Kop. Putra Buluk	Jl. AMD RT 18	Malinau Kota	112/BH/Perindagkop&UMKM/XII/2015	30/12/2015	-	Aktif	-
35	KSU. Mitra Karya Jaya	Jl. AMD (gg. H. Kadir) RT. 18 Malkot	Malinau Kota	008317/BH/m.KUM.2/V/2018	05/04/2018	USP, Toko,	Aktif	-
36	KSU. Godam Pebaya Sejahtera	Jl. Raja Pandita RT. 10, Malinau Hulu	Malinau Kota	9835/BH/M.KUMKM.2/IX/2018	26/07/2018	Pertanian, sembako	Aktif	-
37	KSP. Putra Mandiri Borneo	Malinau Kota	Malinau Kota	AHU-0005734.AH.01.26.TAHUN 2020	07/10/2020	USP	Aktif	-
38	Kop. Jasa Avia Bandara Malinau	Jl. Raja Pandita, Malinau Kota	Malinau Kota	AHU-0006017.AH.01.26.TAHUN 2020	22/10/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
39	Koperasi Jasa Malinau Maju Sejahtera	Jalan Pusat Pemerintahan 010/000	Malinau Kota	AHU-0002621.AH.01.26.TAHUN 2020	05/03/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
40	Koperasi Jasa Pramuka Jaya Malinau	Jalan Pusat Pemerintahan	Malinau Kota	AHU-0007320.AH.01.26.TAHUN 2020	16/12/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
		Jumlah	40				29	11
KEC. MALINAU UTARA								
41	KSU. Pebaya Mulun	Kelapis	Malinau Utara	049/BH/Perindagkop/XII/2008	18/12/2008	Sembako	-	TA
42	KSU. Ferurung	Desa Kelapis	Malinau Utara	25/BH/Perindagkop/IV/2006	04/04/2006	Sembakau	Aktif	-
43	KSU. Rindang	Kantor Camat Mal-Utara	Malinau utara	051/BH/Perindagkop/V/2009	01/05/2009	Indus Kripik	Aktif	-
44	KSU. Andika Jaya Putra	Jl. RSU. RT. VI Respen	Malinau utara	063/BH/Perindagkop & UMKM/IV/2011	04/04/2011	Perdagangan	Aktif	-
45	KSU. Fajar Diniar	Jln. Abd Hasan RT. 01	Malinau Utara	064/BH/Perindagkop & UKM/IV/2011	04/04/2011	Perdagangan	Aktif	-
46	KSU. Bersama Karya Bata	Jl. SPP RT. 01	Malinau utara	065/BH/Perindagkop & UKM/IV/2011	04-04;2011	Ind. Batu bata	-	TA
47	KSU. Keluarga Jaya Amdal Mandiri	Desa Malinau Seberang	Malinau utara	066/BH/Perindagkop & UKM/V/2011	25/05/2011	Perdagangan	Aktif	-
48	KSU. Ayam Bersama	Desa Kaliyamok	Malinau Utara	069/BH/Perindagkop & UMKM/III/2012	28/3/2012	Peternakan	Aktif	-
49	KSU. Pemung tawai	Desa kelapis	Malinau Utara	061/BH/Perindagkop&UMKM/V/2011	18/02/2011	Pertanian, USP	-	TA
50	Koptan. Tarau Mandiri	Desa Respen	Malinau utara	02/BH/Perindagkop/X/2001	30/01/2001	Sembako	-	TA
51	Koptan. Tumu Bagu	Malinau Seberang	Malinau Utara	125/BH/KDK/17.3/IX/2000	08/09/2000	Sembako	-	TA
52	Koptan. Urip Jan	Desa Punan Setarap	Malinau Utara	26/BH/Perindagkop/IV/2006	17/05/2006	Pertanian	-	TA
53	Kop. Kartika	Belayan (Batalyon Yonif 614/RJP)	Malinau utara	055/BH/Perindagkop/VIII/2009	06/08/2009	USP, Toko	-	TA

54	KSU.Camar Bahagia	Jl.Maharaja Dinda RT.V Mal.Seberang	Malinau Utara	081/BH/Perindagkop/V/2013	05/06/2013	-	Aktif	-
55	Kop.TKBM Mekar Baru	Desa Kelapis Kec.Mal.Utara	Malinau Utara	082/BH/Perindagkop/VIII/2013	14/08/2013	-	Aktif	-
56	KSU.Soraya	Desa Belayan	Malinau utara	088/BH/Prindagkop & UMKM/XI/2013	11/11/2013	Sembako,Pertnian,BBM	-	TA
57	Koptan. Feruyung	Desa Lobak Manis	Malinau Utara	012/BH/Perindagkop/VI.2002	20/06/2002	USP, Taxi	Aktif	-
58	KSU. Tina Metuo Taha	Long Kenipe	Malinau Barat	20/BH/Perindagkop/I/2005	24/1/2005	-	-	TA
59	Kop. Jasa Putra Luso	Desa Luso	Malinau Utara	103/BH/Prindagkop & UMKM/V/2014	20/5/2014	-	-	TA
60	Koperasi Konsumen Madani Utama Sejahtera	Jl. Abdul Hasan	Malinau Utara	AHU-0003915.AH.01.26.TAHUN 2020	23/06/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
61	Koperasi Jasa Primer Kartika Raja Pandhita	Asmil Yonif 614/Rjp 004/000	Malinau Utara	AHU-0002023.AH.01.26.TAHUN 2020	05/02/2020	Jasa Lainnya	Aktif	-
		Jumlah	21				11	10
KEC. MALINAU BARAT								
62	Koptan. Gema Borneo Mandiri	Desa Kuala Lapang	Malinau Barat	007472/BH/M.KUKM.2/II/2018	22/2/2018	Pertanian	Aktif	-
63	KSU. Sejahtera Bersama	Kuala Lapang	Malinau Barat	054/BH/Perindagkop/ VI/2009	08/06/2009	Sembako, USP	Aktif	-
64	KSU. Sawit Mandiri	Jl. Singkir Karaganan RT. 01 Sesua	Malinau Barat	067/BH/Perindagkop & UMKM/V/2011	25/05/2011	Perkebunan	Aktif	-
65	KSU. Abadi	Tanjung Lapang	Malinau Barat	115/BH/KDK/17.3/III/2000	27/08/2000	USP	-	TA
66	Koptan. Suka Makmur	Desa Sesua	Malinau Barat	06/BH/Perindagkop/III/2005	23/03/2005	Sembako	-	TA
67	Kopbun. Rimbunan Hijau	Desa Sempayang	Malinau Barat	32/BH/Perindagkop/VIII/2006	17/07/2006	USP, Sembako	Aktif	-
68	Koppas Bhineka	Tanjung Lapang	Malinau Barat	003/BH/Perindagkop/II/2001	29/05/2001	USP	-	TA
69	Kopbun. Mulon Do	Desa Taras	Malinau Barat	31/BH/Perindagkop/VII/2006	17/07/2006	-	-	TA
70	Kop.Bun.Kuala Lapang Maju Sejahtera	Desa Kuala Lapang	Malinau Barat	077/BH/Perindagkop/I/2013	01/09/2013	Perkebunan	Aktif	-
71	Kop.Bun.Pelangi Sawit Sejahtera	Jl.Batu Narit RT.VI No.02 Tg.Lapang	Malinau Barat	078/BH/Perindagkop/I/2013	30/01/2013	Perkebunan	Aktif	-
72	Kop.Jasa Karya Bersama Unit.Sempayang	Desa Sempayang	Malinau Barat	086/BH/Perindagkop/X/2013	16/10/2013	Jasa	Aktif	-
73	Kop. Bun Bengalun Sejahtera	Desa Sesua	Malinau Barat	076/BH/Perindagkop & UMKM/I/2013	01/09/2013	Perkebunan	Aktif	-
74	Kop. Jasa Maju Bersama	Desa Kuala lapang	Malinau Barat	087/BH/Prindagkop & UMKM/X/2013	20-10-2013	Pemasaran	Aktif	-
75	Koptan. Hutan Emas	Tanjung Lapang	Malinau Barat	69/BH/KDK/17.3/V/1999	24/06/1999	USP, Toko	-	TA
76	Koptan. Pebaya Tau	Kuala Lapang	Malinau Barat	30/BH/Perindagkop/ V/2006	10/05/2006	USP, Saprodu	-	TA
77	KSU SMKN 1 Malinau	Desa Tanjung Lapang	Malinau Barat	101/BH/Perindagkop&UMKM/II/2014	25/2/2014	-	Aktif	-
78	Koperasi Malinau Sawit Abadi	Tanjung Lapang	Malinau Barat	106/BH/Perindagkop&UMKM/IX/2014	26/9/2014	Perkebunan	Aktif	-
79	KSU. Busak Baku	Jln. Pinus Rt XIII Tanjung Lapang	Malinau Barat	37/BH/Perindagkop/VI/2007	14/06/2007	Jasa,	Aktif	-
80	Kopkar PT. Inhutani Kaltara	Tanjung Lapang Rt. 12	Malinau Barat	107/BH/XXXIV.4/II/2015	27/2/2015	-	Aktif	-
		Jumlah	19				13	6

KEC. MENTARANG								
81	KSU. Gerbang Dema	Pulau Sapi	Mentarang	42/BH/Perindagkop/VI.2008	19/11/2008	Penampung beras	Aktif	-
82	Koptan Sri Agung	Desa Singai Terang	Mentarang	007/BH/Perindagkop/IV/2002	04/04/2002	USP, Sembako	Aktif	-
83	Koptan. Paking Maju	Desa Paking	Mentarang	04/PAD/BH/Perindagkop/VII/03	07/07/2003	Sembako	Aktif	-
84	Koptanbun. Keluarga Usaha Baru	Lidung Keminci	Mentarang	013/BH/Perindagkop/VI/2002	30/06/2002	Sembako, USP	Aktif	-
85	Koptan. Supinara	Pulau Sapi	Mentarang	184/BH/KDK 17.3/II/2001	28/02/2001	-	-	TA
86	Koptan. Pantai Bahagia	Mentarang Baru	Mentarang	181/BH/KDK 17.3/VI/2000	02/06/2000	-	-	TA
87	KUD. Pertanian	Pulau Sapi	Mentarang	108/BH/PAD/K. Wk/I/1996	03/06/1996	-	-	TA
88	Kop. Wanita Tani Wanita	Lidung Keminci	Mentarang	008249/BH/M.KUKM.2/IV/2018	24/04/2018	Jasa	Aktif	-
		Jumlah	8				5	3
MALINAU SELATAN								
89	Koptanbun. Gunung Sidi	Langap	Malinau Selatan	166/BH/KDK/17.3/XI/2000	11/10/2000	-	-	TA
90	KSU. Metui	Gong Solok	Malinau Selatan	39/BH/KDK.17.3/VII/1998	07/07/1998	Sembako	Aktif	-
91	KSU. Laue Terig Lestari	RT. I Gong Solok	Malinau Selatan	057/BH/Perindagkop/VIII/2010	23/08/2010	USP, Jasa Anakutan	Aktif	-
92	KSU. Saban Hari	Desa Punan Gong Solok	Malinau Selatan	058/BH/Perindagkop/VIII/2010	31/08/2010	USP, Jasa Angkut	Aktif	-
93	Kop.Bun.Cahaya Rian	Desa Punan Rian Kec.Malinau Selatan	Malinau Selatan	079/BH/Perindagkop/I/2013	30/01/2013	-	Aktif	-
94	KSU.Lampun Sakti	Desa Bila Bekayuk	Malinau Selatan	080/BH/Perindagkop/I/2013	02/04/2013	-	Aktif	-
95	KSU. Usaha Bersama	Desa Langap	Malinau Selatan	071/BH/Perindagkop & UMKM/IV/20112	16/4/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
96	KSU.Bina Mandiri	Desa Long Adiu	Malinau Selatan	071/BH/Perindagkop & UMKM/IV/2012	16/4/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
97	KSU. Ca Kimet	Desa Loreh	Malinau Selatan	44/BH/Perindagkop/VI/2008	10/06/2008	Sembako, USP	-	TA
98	KSU Gerbang Dema	Long Loreh	Malinau Selatan	054/BH/Perindagkop/ VI/2009	08/06/2009	USP,Jasa Sembako	-	TA
99	Koptan Fajar Baru	Desa Sengayan	Malinau Selatan	141/BH/KDK.17.3/VII/2000	18/07/2000	USP	-	TA
100	Kop.Jasa Bina Usaha	Desa Batu Kajang Mal.Selatan Hilir	Malinau Selatan	084/BH/Perindagkop/IX/2013	09/03/2013	Jasa	Aktif	-
101	KSU.Des Naha Kramo Jaya Mandiri	Desa.Naha Krano	Malinau Selatan Hulu	083/BH/Perindagkop/VIII/2013	14/08/2013	-	Aktif	-
102	Kop. Produsen. Benuang Bara Loreh Masela	Jl. Gerdema RT.8 Ds. Lg.Loreh	Malinau Selatan	AHU-0006991.AH.01.26.Tahun 2020	02/12/2020	Produsen	Aktif	-
		Jumlah	14				10	4
MENTARANG HULU								
103	KSU. Gerbang Dema Belalau Indah	Mentarang Hulu	Mentarang Hulu	025/Perindagkop/V/2009	30/05/2009	USP, Toko	Aktif	-
		Jumlah	1				1	0
SUNGAI BOH								

104	KSU. Pemung Tawai	Mahak Baru	Sungai BOH	005/BH/Perindagkop/II/2002	30/04/2002	Sembako	Aktif	-
105	KSU. Mudip Mading	Desa Agung Baru	Sungai BOH	27/BH/Perindagkop/IV/2006	28/04/2006	Sembako	Aktif	-
106	KSU. Ledung Mading	Sungai Boh	Sungai BOH	45/BH/Perindagkop/VIII/2008	19/08/2008	Sembako	Aktif	-
107	KSU.Sumber Makmur	Desa Agung Baru	Sungai BOH	072/Perindagkop & UMKM/2012	14/5/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
		Jumlah	4				4	0
PUJUNGAN								
108	KSU. Bangen Tawai	Desa Long Bena	Pujungan	062/BH/Perindagko & UMKM/III/2011	07/03/2011	Sembako, USP	Aktif	-
109	KUD. Bawane	Long Pujungan	Pujungan	175a/BH/PAD/KDK.17/VI/1997	15/04/1997	Sembako, Pertanian	-	TA
110	Kop. Distribusi Sahabat Setia	Desa Long Apan	Pujungan	10/BH/PAD/Perindagkop/V/06	04/05/2006	Sembako, BBM	Aktif	-
111	Koptan Rimba Harapan	Desa Long Lame	Pujungan	35/BH/Perindagkop/II/2007	21/12/2000	-	-	TA
112	KSU Bangen Tawai	Desa Long Bena	Pujungan	085/BH/Perindagkop/IX/2013	09/11/2013	-	Aktif	-
		Jumlah	5				3	2
KEC. BAHAU HULU								
113	KSU. Bahau Hulu	Desa Long Alango	Bahau Hulu	050/BH/Perindagkop/III/2009	04/03/2009	Sembako, Pertanian	Aktif	-
114	Koptan. Mekar Jaya	Long Tebulo	Bahau Hulu	011/BH/Perindagkop/VII/2002	18/03/2002	Pertanian	-	TA
		Jumlah	2				1	1
KEC. KAYAN HILIR								
115	KUD. Bangun	Long Pipa	Kayan Hilir	1015/BH/17	17/08/1945	-	-	TA
116	KSU. Tunas Harapan	Desa Long Metun	Kayan Hilir	060/BH/Perindagkop/II/11	14/02/2011	Sembako	Aktif	-
117	KSU. Data benuang	Long Sule	Kayan Hilir	041/BH/Perindagkop/XII/2007	14/12/2007	Sembako, Kerajinan	Aktif	-
118	KSU. Gerbang Demas	Data Dian	Kayan Hilir	48/BH/Perindagkop/XI/2008	19/11/2008	Sembako	Aktif	-
119	KSU.Perintis	Desa Long Pipa	Kayan Hilir	074/BH/Perindagkop & UMKM/VII/2012	9/7/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
		Jumlah	5				4	1
KEC. KAYAN HULU								
120	KSU.Bendungan Indah	Desa Sei Barang	Kayan Hulu	074/BH/Perindagkop & UMKM/XII/2012	20/1/2012	Pengadaan Barang, Jasa	Aktif	-
121	KSU. Bina Usaha Bersama	Desa Long Top	Kayan Hulu	001/BH/Perindagkop/X/2001	20/10/2001	Sembako	-	TA
122	KSU. Bangen Tawai	Desa Long Lebusan	Kayan Hulu	011/BH/Perindagkop/I/2003	09/07/2002	Sembako, Pertanian	-	TA
123	KUD. Long Nawang	Desa Long Nawang	Kayan Hulu	03/PAD/Perindagkop/I/2003	09/01/2003	Sembako	Aktif	-
124	Koptan Gendingan Apo Kayan	Desa Long Lebusan	Kayan Hulu	011/BH/Perindagkop/I/2003	09/07/2002	Sembako, Pertanian	-	TA
125	Koptanbun. Perubahan Usaha Baru	Desa Apo Kayan	Kayan Hulu	18/BH/Perindagkop/XI/2003	24/11/2003	Sembako	-	TA
		Jumlah	6				2	4

KAYAN SELATAN								
126	KSU. Senguyun	Long Apung	Kayan Selatan	033/BH/Perindagkop/II/2001	02/02/2001	Sembako		TA
127	KSU. Peteneg Udip	Desa Long Uro	Kayan Selatan	40/BH/Perindagkop/VIII/2007	13/08/2007	Pertanian		TA
128	Koperasi Jasa Angkasa Ampung Sejahtera	Long Apung	Kayan Selatan	AHU-0000294.AH.01.26 Tahun 2019	14/11/2019	Ksu Angkutan Darat, Kargo,JPT,EMPU	Aktif	-
129	KPN. Harapan Jaya	Long Apung	Kayan Selatan	43/BH/Perindagkop/VI/2008	10/06/2008	Sembako, USP		TA
		Jumlah	4				1	3
		Jumlah Total	129				84	45

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa :

- **Usaha Mikro adalah** : usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria :
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Contohnya : pedagang asongan/keliling, pedagang lapakan di pasar, pedagang kaki lima, usaha jasa pangkas rambut, Bengkel sepeda pinggir jalan, dll

- **Usaha Kecil adalah** : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah :

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contohnya : usaha binatu/loundry, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan lain sebagainya.

- **Usaha Menengah adalah** : usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dengan kriteria :
 - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Contohnya : perusahaan pembuat roti skala menengah, restoran besar, toko bangunan, toko elektronik, mini market, dll.

Dari uraian diatas beserta contohnya maka dapat disimpulkan bahwa lingkup usaha UMKM yang terbanyak ada pada sektor industri dan perdagangan.

Data lima tahun terakhir (2017 – 2021) perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 11
Perkembangan Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau
(Tahun 2017 – 2021)

No	Skala Usaha	Tahun (Unit)									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.	Industri	Perdag.
1.	Mikro	762	1773	822	1773	1189	1773	1252	1775	1537	2176
2.	Kecil	1	200	1	200	1	200	1	252	1	78
3.	Menengah	1	13	1	13	1	13	1	45	1	47
J U M L A H		764	1986	824	1986	1191	1986	1254	2072	1539	2301

TABEL 12
Rekapitulasi Jumlah UMKM se Kabupaten Malinau
(Tahun 2017 – 2021)

No	Skala Usaha	Tahun (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	MIKRO	2535	2595	2962	3000	3713
2.	KECIL	201	201	201	253	79
3.	MENENGAH	14	14	14	46	48
J U M L A H		2750	2810	3177	3299	3840

Dari data diatas menunjukan bahwa perkembangan jumlah usaha UMKM di Kab. Malinau cukup pesat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a.Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023. Sasaran adalah

rumusan kondisi yang menggambarkan hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memenuhi kriteria SMART-C. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran RKPD Tahun 2023 digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang akan dicapai berdasarkan rancangan awal RKPD Kab. Malinau yang menjadi tugas OPD Dinas Perindag adalah :

Tabel 13
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau bagi Dinas Perindag Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1.	Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	- Persentase koperasi berkualitas - Persentase peningkatan usaha mikro dan kecil	72 % 73,30 %
2.	Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	Kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB	2,70 %

Adapun isu-isu yang penting/strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindag sebagaimana yang ditetapkan didalam Ranwal RKPD Kab. Malinau tahun 2023 adalah : **Pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.**

b. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau

Untuk mengimplementasikan isu strategis tersebut, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan untuk satu tahun kedepan (tahun 2023). Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu urusan pembangunan yang terdapat disuatu daerah yang

diutamakan atau didahulukan dari yang lain karena berbagai pertimbangan seluruh pemangku kepentingan daerah, baik dari sisi teknik maupun non teknis.

Berdasarkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yakni “**Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintah dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan** “ maka yang menjadi prioritas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan
2. Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik
6. Meningkatkan penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan 6 poin prioritas pembangunan Kab. Malinau tahun 2023, maka prioritas yang harus dijalankan oleh Dinas Perindag selaku instansi teknis adalah poin ke 2 yakni : **Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi**. Untuk melaksanakan poin tersebut tentu membutuhkan tindakan yang tepat dan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu telah ditekankan program-program pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2023 yaitu :

- a. Program Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dari kedua program prioritas tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Malinau tahun 2023 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan berbagai macam usulan yang masuk/diterima. Baik yang bersifat internal maupun eksternal. Usulan yang bersifat internal yakni dari OPD Dinas Perindag sendiri sedangkan yang bersifat Eksternal adalah berasal dari musrenbang baik tingkat RT, Desa dan Kecamatan dan POKIR dari DPRD Kab. Malinau. Semua usulan tersebut dihimpun dan diakomodir kemudian disusun dalam bentuk program dan kegiatan.

Mengacu pada rancangan awal tersebut, setelah dilakukan analisis kebutuhan oleh Tim penyusunan RKPD Dinas Perindag dengan mempertimbangkan semua usulan yang ada sesuai dengan pagu anggaranyang diberikan ditambah dengan beberapa kegiatan tambahan yang mendukung visi dan misi Bupati/Wabup Malinau periode 2021-2025, makahasilnya dapat di
lihat pada Tabel T-C.31.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MALINAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	5	9	6	10
1	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase Diklat Koperasi yang diadakan	100%	100%	100.000.000	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anggota koperasi yang ikut diklat	18%	18%	100.000.000	100.000.000
	<i>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	75 orang	75 orang	100.000.000	100.000.000
2	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase UMKM yang diberdayakan	2,5%	9,4%	891.000.000	1.294.097.500
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase cakupan Usaha Mikro yang diberdayakan	2,5%	9,4%	891.000.000	1.294.097.500
	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.</i>	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	200 unit usaha	300unit usaha	851.000.000	1.254.097.500
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM</i>	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	200 orang	200 orang	345.000.000	350.000.000

	<i>Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>					
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	80%	6.200.216.783	6.230.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80%	10.000.000	10.000.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	5.000.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.315.000.000	5.322.500.000
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang	38 orang	5.300.000.000	5.300.000.000
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	7.500.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	5.000.000	7.500.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	5.000.000	7.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	7.500.000	7.500.000
	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan laporan hasil	2 laporan	2 laporan	7.500.000	7.500.000

		koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	7.500.000	7.500.000
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	7.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	250.000.000	250.000.000
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	75.000.000	75.000.000
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	150.000.000	150.000.000
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	25.000.000	25.000.000
	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	277.716.783	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	200.000.000	200.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1 laporan	200.000.000	200.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	125.000.000	125.000.000
	<i>Pemeliharaan Aset Tetap</i>	Jumlah aset tetap yang dipelihara	6 unit	6 unit	82.500.000	75.000.000
	<i>Pemeliharaan Aset Tidak Tetap</i>	Jumlah aset tidak tetap yang dipelihara	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	1.899.951.220	511.902.500
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	1.564.951.220	176.902.500

	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	1 unit	1.564.951.220	176.902.500
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	100%	100%	335.000.000	335.000.000
	<i>Pemberdayaan pengelola sarana distribusi Perdagangan</i>	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	1 dokumen	335.000.000	335.000.000
5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80%	80%	265.000.000	265.000.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau	100%	100%	35.000.000	115.000.000
	<i>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.</i>	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen	24 laporan	24 laporan	35.000.000	35.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Malinau	100%	100%	230.000.000	230.000.000
	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24 laporan	24 laporan	30.000.000	30.000.000
	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota</i>	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	4 laporan	4 laporan	200.000.000	200.000.000
6	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	75.000.000	77.500.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat UTTP Yang Sesuai Standar Metrologi Legal	100%	100%	75.000.000	77.500.000

	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	200 unit	200 unit	75.000.000	77.500.000
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	100%	100%	1.150.000.000	1.742.695.003
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau	100%	100%	1.150.000.000	1.742.695.003
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	150.000.000
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	1.092.795.003
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	500.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rancangan awal RKPD 2023 ini tentu mempertimbangkan berbagai macam usulan masyarakat yang dihimpun dari kegiatan-kegiatan musrenbang yang dilakukan. Mulai dari musrenbang RT, Desa hingga kecamatan kemudian dilanjutkan dalam forum OPD. Tentu saja usulan ini diselarskan dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaran OPD Dinas Perindag dengan memperhatikan misi, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kab. Malinau untuk tahun 2023. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat disajikan pada tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat
pada Musrenbangdes dan Pokir DPRD Kab. Malinau Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
1.1	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
1.1.a	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
1	Bantuan Peralatan dan Modal UMKM	Desa Pulau Sapi-Kec. Mentarang	Jumlah alat	1 set	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
2	Bantuan Mesin Penggilingan Daging	Desa Malinau Hilir-Kec. Malinau Kota	Jumlah mesin	1 set	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
3	Pengadaan Peralatan Menjahit	Desa Malinau Kota-Kec. Malinau Kota	Jumlah mesin	1 set	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
4	Pelatihan Perbengkelan	Desa Tulid Fasan-Kec. Mentrang	Jumlah peserta	30 peserta	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
1.1.b	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				
5	Pembangunan Pusat Anyaman Rotan	Long Sule dan Long Pipa-Kec. Kayan Hilir	Jumlah bangunan	1 unit	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
2	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
2.1	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				

2.1.a	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
6	Pengadaan SPBU Kompak	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan	1 unit	hasil musrenbang kecamatan
7	Pembangunan KCP BPD BANKALTIM-TARA	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan	1 unit	hasil musrenbang kecamatan
8	Pembangunan Pasar Tradisional Rakyat	Long Sule dan Long Pipa-Kec. Kayan Hilir	Jumlah pasar	1 unit	hasil musrenbang kecamatan
9	Siring belakang Pasar Desa	Data Dian-Kec. Kayan Hilir	Jumlah dana	1 pasar	hasil musrenbang kecamatan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
3.1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
3.1.a	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.				
10	Pengadaan Subsidi Ongkos Angkut Sembako	Kec. Bahau Hulu	Jumlah subsidi	200 juta	hasil musrenbang kecamatan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian				
4.1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
4.1.a	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi				
11	Pembentukan Koperasi RT	Malinau Hulu	Jumlah Koperasi	1 koperasi	hasil musrenbang kecamatan
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
5.1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
5.1.a	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
12	Pelatihan Kelompok Usaha Baru	Pelita Kanaan	Jumlah peserta	30 orang	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
13	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM/ Pelatihan	Kec. Mentarang	Jumlah peserta	30 orang	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
14	Penguatan Dana Pelatihan Milenial Mandiri se-Kec.Malinau Selatan	Kec. Malinau Selatan	Jumlah dana	200 juta	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD

15	Pelatihan BUMDes	Lebusan-Kec. Sungai Boh	Jumlah peserta	30 peserta	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD
16	Pelatihan Manajemen usaha Produksi teknologi pemasaran	Metun-Kec. Kayan Hilir	Jumlah peserta	30 peserta	hasil musrenbang kecamatan dan POKIR DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap identifikasi kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terutama mengacu pada Renstra Kementrian yang membawahi Dinas Perindag. Seperti Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2020– 2024 bahwa arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui 4 (empat) pilar strategi, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (market maintenance).
2. Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (market creation).
3. Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (product creation).
4. Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (export facilitation and import management).

Sedangkan arah kebijakan Perdagangan Dalam Negeri akan dicapai melalui strategi, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
2. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
3. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
4. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
5. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional.
6. Mendorong penggunaan produk domestik.
7. Meningkatkan perlindungan konsumen.
8. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
9. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
10. Mendorong perdagangan berjangka komoditi.
11. Mendorong pengembangan sistem gudang Resi Gudang dan pasar Lelang
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 diarahkan agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sektor

industri, perdagangan dan koperasi dalam skala nasional mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

a. Sektor Industri

Mengembangkan potensi sektor industri secara optimal baik potensi SDA maupun SDM nya dengan melakukan pendataan, pembinaan dan suntikan dana bagi usaha industri yang masih kekurangan modal usaha sehingga mampu bersaing dengan sektor usaha lain dan daerah lain.

b. Sektor Perdagangan

Mengembangkan dan menambah sarana usaha perdagangan serta penataan tempat usaha guna memperlancar proses jual beli. Selain itu berupaya untuk meningkatkan dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa dari dan keluar daerah serta ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang ada di Kab. Malinau.

c. Sektor Koperasi dan UMKM

Meningkatkan usaha koperasi dan UMKM agar bisa berkembang dan maju seperti yang diharapkan dengan jalan terus-menerus melakukan pembinaan dan mengikutsertakan para pelaku usahanya dalam diklat-diklat wirausaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu juga memberikan suntikan modal usaha melalui kegiatan perkuatan modal bagi UMKM.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja OPD oleh Dinas Perindag Kab. Malinau adalah untuk mengembangkan sektor-sektor :

1. Sektor Industri

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha industri yang dilakukan oleh masyarakat di Kab. Malinau dengan melakukan pembinaan, peningkatan SDM pelaku usaha dan pengawasan yang berkesinambungan dari Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan daya saing industri dengan menurunkan ongkos produksi dan harga jual produk jadi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat pelaku usaha.

3. Meningkatkan penggunaan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitasnya.
4. Meningkatkan kemampuan permodalan dan aksesnya serta manajemen usaha bagi para pelaku usaha sehingga memacu perkembangan industri itu sendiri.

2. Sektor Perdagangan

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga sembako dan barang strategis agar tidak melambung tinggi.
2. Mengendalikan distribusi barang yang beredar di masyarakat agar barang-barang kedaluwarsa tidak dijual lagi oleh para pedagang ditengah-tengah masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap alat takar dan timbangan yang dipakai oleh para pedagang agar sesuai dengan standar metrology legal dengan melakukan tera dan pengawasan secara terus menerus.

3. Sektor Koperasi dan UMKM

1. Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat di Kabupaten Malinau dengan melakukan pembinaan yang berkesinambungan agar tetap eksis dan berkembang.
2. Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM yang ada di Kab. Malinau kepada pihak perbankan agar tidak tergantung pada dana bantuan dan pinjaman dari Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

Adapun sasaran pada Renja OPD pada Dinas Perindag Kab.Malinau adalah :

a. Sektor Industri

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha industri yang dilakukan oleh masyarakat di Kab.Malinau dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dari Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya daya saing industri dengan menurunkan ongkos produksi dan harga jual produk jadi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat pelaku usaha.
3. Meningkatnya penggunaan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitasnya.
4. Meningkatnya kemampuan permodalan dan manajemen usaha bagi para pelaku usaha sehingga memacu perkembangan industri itu sendiri.

b. Sektor Perdagangan

1. Meningkatnya daya beli masyarakat dengan mengendalikan harga sembako dan barang strategis agar tidak melambung tinggi.
2. Terkendalinya distribusi barang yang beredar di masyarakat agar barang-barang kedaluwarsa tidak dijual lagi oleh para pedagang ditengah-tengah masyarakat.
3. Meningkatnya pengawasan terhadap alat takar dan timbangan yang dipakai oleh para pedagang agar sesuai dengan standar metrology legal dengan melakukan tera dan pengawasan secara terus menerus.

c. Sektor Koperasi dan UMKM

1. Terwujudnya koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat di Kabupaten Malinau dengan melakukan pembinaan yang berkesinambungan agar tetap eksis dan berkembang.
2. Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM yang ada di Kab. Malinau kepada pihak perbankan agar tidak tergantung pada dana bantuan dan pinjaman dari Pemerintah Daerah.

c. Program dan Kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindag tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel T-C.33**.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MALINAU

OPD : DINAS PERINDAG KAB. MALINAU

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024		Musrenbang /Pokir	Prioritas Kabupaten
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.05	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase diklat koperasi yang diadakan		100%	100.000.000			100%	100.000.000		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anggota koperasi yang ikut diklat perkoperasian		18%	100.000.000			18%	100.000.000		
2.17.05.2.01.01	<i>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Kab. Malinau	75 orang	100.000.000	APBD		75 orang	100.000.000	Musrenbang /Pokir	☑
2.17.07	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase UMKM yang diberdayakan		2,5%	791.000.000			4,0%	1.604.097.500		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase UKM yang diberdayakan		2,5%	791.000.000			4,0%	1.604.097.500		
2.17.07.2.01.04	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.</i>	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kab. Malinau	200 unit usaha	446.000.000	APBD		300 unit usaha	1.254.097.500	Musrenbang /Pokir	☑

2.17.07.2.01.06	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Malinau dan Luar Daerah	200 orang	345.000.000	APBD		200 orang	350.000.000		?
3.30.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Malinau		100%	6.200.216.783			80%	6.230.000.000		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja SKPD		100%	10.000.000			80%	10.000.000		
3.30.01.2.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Malinau	2 dokumen	5.000.000	APBD		2 dokumen	5.000.000		?
3.30.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	5.000.000		?
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.315.000.000			100%	5.322.500.000		
3.30.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	38 orang / bulan	5.300.000.000	APBD		38	5.300.000.000		?
3.30.01.2.02.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab. Malinau	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	7.500.000		?
3.30.01.2.02.05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Malinau	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	7.500.000		?

3.30.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Malinau	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	7.500.000		?
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	7.500.000			100%	7.500.000		
3.30.01.2.03.03	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan laporan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Malinau	2 laporan	7.500.000	APBD		2 laporan	7.500.000		?
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	7.500.000			100%	7.500.000		
3.30.01.2.05.04	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Malinau	1 dokumen	7.500.000	APBD		1 dokumen	7.500.000		?
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	527.716.783			100%	550.000.000		
3.30.01.2.06.02	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	75.000.000	APBD		1 paket	75.000.000		?
3.30.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	150.000.000	APBD		1 paket	150.000.000		?
3.30.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	2 paket	25.000.000	APBD		2 paket	25.000.000		?
3.30.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah	4 laporan	277.716.783	APBD		4 laporan	300.000.000		?
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	200.000.000			100%	200.000.000		
3.30.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Malinau	1 laporan	200.000.000	APBD		1 laporan	200.000.000		?

3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	132.500.000			100%	132.500.000		
3.30.01.2.09.07	<i>Pemeliharaan Aset Tetap</i>	Jumlah aset tetap yang dipelihara	Kab. Malinau	6 unit	82.500.000	APBD		6 unit	82.500.000		?
3.30.01.2.09.08	<i>Pemeliharaan Aset Tidak Tetap</i>	Jumlah aset tidak tetap yang dipelihara	Kab. Malinau	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	50.000.000		?
3.30.03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		100%	1.899.951.220			100%	511.902.500		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100%	1.564.951.220			100%	176.902.500		
3.30.03.2.01.01	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kab. Malinau	1 unit	1.564.951.220	APBD		1 unit	176.902.500	Musrenbang	?
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat		100%	335.000.000			100%	335.000.000		
3.30.03.2.02.02	<i>Pemberdayaan pengelola sarana distribusi Perdagangan</i>	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Malinau	1 dokumen	335.000.000	APBD		1 dokumen	335.000.000		?
3.30.04	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		80%	265.000.000			80%	265.000.000		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau		100%	35.000.000			100%	35.000.000		
3.30.04.2.01.03	<i>Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.</i>	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen	Kab. Malinau	24 laporan	35.000.000	APBD		24 laporan	35.000.000	Musrenbang	?

3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Malinau		100%	230.000.000			100%	230.000.000		
3.30.04.2.02.01	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	24 laporan	30.000.000	APBD		24 laporan	30.000.000		?
3.30.04.2.02.03	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota</i>	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Kab. Malinau	4 laporan	200.000.000	APBD		4 laporan	200.000.000		?
3.30.06	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		100%	75.000.000			100%	77.500.000		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase Alat UTTP Yang Sesuai Standar Metrologi Legal		100%	75.000.000			100%	77.500.000		
3.30.06.2.01.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	Kab. Malinau	200 unit	75.000.000	APBD		200 unit	77.500.000		?
3.31.02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Perencanaan dan Pembangunan Industri		100%	1.150.000.000			100%	1.742.695.003		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kab. Malinau		100%	1.150.000.000			100%	1.742.695.003		
3.31.02.2.01.03	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Malinau	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000		?
3.31.02.2.01.04	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Malinau	1 dokumen	500.000.000	APBD		1 dokumen	1.092.795.003	Musrenbang /Pokir	?

3.31.02.2.01.05	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Malinau	1 dokumen	500.000.000	APBD		1 dokumen	500.000.000	Musrenbang /Pokir	2
-----------------	---	---	--------------	-----------	-------------	------	--	-----------	-------------	-------------------	---

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023.

Adapun sumber dana dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 adalah berasal dari :

1. APBD Kabupaten Malinau untuk tahun anggaran 2023.
2. APBN Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) baik yang sifatnya reguler maupun tugas pembantuan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dana pembangunan yang menyokong kegiatan OPD Dinas Perindag Kab. Malinau berasal dari dua sumber tersebut dan diharapkan jumlahnya bisa ditingkatkan mengingat kebutuhan dana untuk melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan tersebut terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat dan semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Awal OPD Dinas Perindag Kab. Malinau tahun 2023 ini disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan semangat Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Poin-poin kegiatan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musrenbang desa yang kemudian dilanjutkan pada musrenbang kecamatan dan kabupaten. Program dan kegiatan tersebut benar-benar murni dari masyarakat sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program Gerdema adalah program yang berbasis pada masyarakat khususnya masyarakat desa sebagai mayoritas penduduk Kabupaten Malinau. Dengan program ini diharapkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa tercapai dengan baik.

Oleh karena itu Renja Awal 2023 ini sifatnya berkesinambungan sesuai dengan Tupoksi serta sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Semoga Renja Awal 2023 ini dapat memenuhi sebagian harapan masyarakat dan dapat direalisasikan pada tahun 2023 yang akan datang.